

# OPTIMALISASI PERAN MAHASISWA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PILKADA SERENTAK YANG BAIK DAN BERKUALITAS

Yusuf Adam Hilman<sup>1\*</sup>, Jusuf Sarjono<sup>2</sup>, Khoirurrosyidin<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo  
Jl. Budi Utomo No.10 Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia  
\*Korespondensi: [adam\\_hilman@umpo.ac.id](mailto:adam_hilman@umpo.ac.id)

## Abstrak

*Pelanggaran pilkada serentak di Indonesia merupakan persoalan penting, upaya yang telah dilakukan oleh petugas dirasa belum cukup, tim pengabdian kemudian melihat peluang dikarenakan banyaknya mahasiswa yang menjadi petugas pemilu, kemudian berupaya untuk melakukan optimalisasi pengetahuan dan juga ketrampilan dalam memahami berbagai bentuk pelanggaran pemilu, kemudian melakukan semacam pelatihan dengan dua kegiatan utama yakni webinar dan workshop online dan diakhiri dengan evaluasi kegiatan, dalam kegiatan tersebut kemudian diperoleh hasil bahwa ada peningkatan pemahaman terkait pelanggaran dalam pemilukada.*

*Kata kunci: peran mahasiswa, pelanggaran pemilu, pemilukada serentak*

## 1. ANALISIS SITUASI

Permasalahan dalam pemilihan umum kepala daerah terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia, hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan dalam praktik demokrasi di negara Indonesia. Permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pilkada, disebabkan oleh beberapa hal, antara lain praktik politik transaksional, profesionalisme petugas penyelenggara pemilu terkait netralitas dan sikap apatisisme masyarakat dalam pilkada.

Terjadinya kecurangan dalam pemilu atau *election fraud* karena tingkat ekonomi masyarakat yang kurang memadai sehingga memunculkan praktik *vote buying*, namun di beberapa kasus masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik terkadang masih saja terlarut dalam praktik *money politic*, banyak yang beranggapan bahwa ajang pemilu adalah sarana untuk mendapatkan imbalan dari para kandidat peserta pemilukada (Warganegara, 2019).

Profesionalisme petugas pemilu juga jadi persoalan menarik karena dalam penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2015 masih terdapat beberapa pelanggaran di wilayah Jawa Timur pada khususnya, sehingga petugas pemilu dipandang tidak netral (Nugroho, 2017).

Pada tahun 2015 pilkada serentak telah selesai dilaksanakan namun bayang – bayang terkait partisipasi masyarakat yang masih rendah tetap menjadi persoalan yang utama dan terjadi di berbagai daerah (Lisma & AWL, 2017).

Beberapa persoalan yang dihadapi, sebenarnya sudah di prediksi oleh badan pengawas pemilu, disampaikan dalam dokumen kerawanan pilkada tahun 2015 yang tidak jauh beda dengan berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia.

Sebelum pelaksanaan Pemilihan umum kepala daerah, Badan Pengawas Pemilu sudah memberikan prediksi terkait dengan indeks kerawanan pilkada 2015, yang disusun berdasarkan 5 (lima) variabel, yakni: 1). Profesionalisme Penyelenggara, 2). Politik Uang, 3). Akses Pengawasan, 4). Partisipasi Masyarakat, 5) Kemaamanan Daerah (Bawaslu RI, 2015).

Berangkat dari berbagai persoalan yang dihadapi, perlu upaya untuk melakukan pengawalan terhadap praktik demokrasi, dari Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu, dan tim independen.

KPU melakukan metode dialogis dan berkomunikasi langsung dengan pemilih hal ini dirasakan dengan efektif untuk meningkatkan minat masyarakat untuk memilih (Novita & Fitri, 2020). Bawaslu mengajak masyarakat untuk melakukan pengawasan dalam rangka penyelenggaraan pemilu terkait potensi kecurangan yang mungkin terjadi (Nurkinan, 2018). Sosialisasi terkait pemilihan umum di daerah merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU untuk meningkatkan pemilih, hal tersebut telah terbukti dapat meningkatkan minat pemilih (Chandra, et al., 2018). Pengabdian dalam format bimbingan teknis dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Syarifudin, 2020).

Berbagai upaya yang telah dilakukan memang beragam, mulai yang dilakukan oleh: KPU, Bawaslu, dan Juga Panwas, namun banyak keterbatasan yang dimiliki petugas negara, sehingga peran dari masyarakat juga dibutuhkan untuk mengawal jalannya praktik demokrasi ini.

Berangkat dari kondisi tersebut, kami tim pengabdian dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo mencoba melakukan praktik pembekalan mahasiswa ilmu pemerintahan, supaya dapat berperan aktif dalam proses demokrasi tersebut, kami mendapati mahasiswa kami banyak menjadi petugas dalam praktik pemilu

di tahun 2020, kemudian kami berinisiatif untuk memberikan pembekalan terkait berbagai jenis pelanggaran yang dapat mengganggu pelaksanaan dari esensi demokrasi.

## 2. METODE PELAKSANAAN

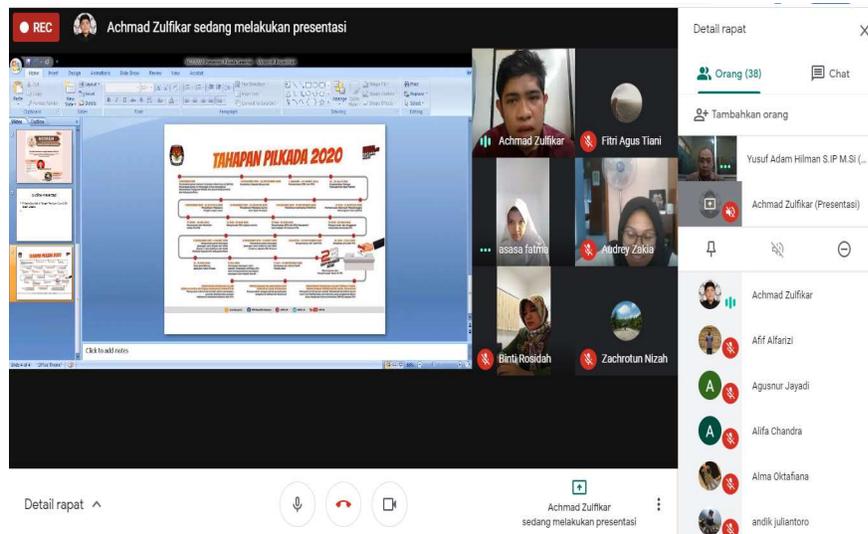
Untuk optimalisasi peran mahasiswa dalam rangka penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia, tim pengabdian meningkatkan kemampuan mahasiswa agar memiliki ketrampilan dalam melihat potensi pelanggaran pada pemilukada. Kegiatan ini dirancang dilakukan secara *offline* namun karena kondisi pandemi, maka kegiatan dilakukan secara *online*. Kegiatan yang dilakukan terdiri dari beberapa tahapan, antara lain: 1) *workshop* refleksi penyelenggaraan pilkada, 2) webinar tentang pengalaman menjadi petugas pemilu, dan 3) evaluasi kegiatan pelatihan.

- a. *Workshop online* refleksi penyelenggaraan pilkada. Tahapan yang pertama adalah kegiatan yang mendatangkan pemateri sebagai pengamat politik, yang akan membagikan pengalaman serta data hasil riset terkait pelanggaran pilkada yang ada di Indonesia, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa terkait pelanggaran pemilukada yang ada di Indonesia, termasuk jenisnya dan juga berbagai modelnya.
- b. Webinar pengalaman menjadi petugas pemilu. Tahapan kedua adalah kegiatan secara online dengan mengundang petugas pemilu, yang sudah berpengalaman, yang akan berbagi pengalaman dilapangan, terkait pelanggaran pemilukada serentak, tujuan ini supaya mahasiswa memiliki pengetahuan terkait pelanggaran pemilukada ketika proses pemilihan sedang dilakukan.
- c. Evaluasi kegiatan *workshop* dan webinar. Tahapan ini bertujuan untuk melihat sejauhmana hasil *workshop* dan webinar tersebut dapat dipahami dan juga dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa

## 3. PELAKSANAAN DAN HASIL

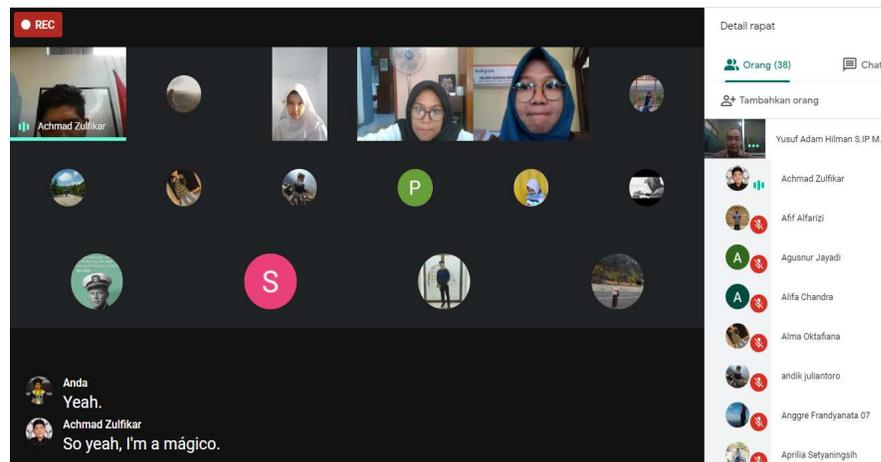
Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui bentuk, yaitu *workshop online*, webinar pengalaman menjadi petugas pemilu dan evaluasi. Pada kegiatan *workshop online* dengan tema refleksi pelaksanaan pilkada, pakar politik menjelaskan tentang berbagai bentuk pelanggaran dalam pemilukada yang

terjadi, disini, mahasiswa diajak untuk memahami, dinamika pemelukada yang ada di Indonesia.



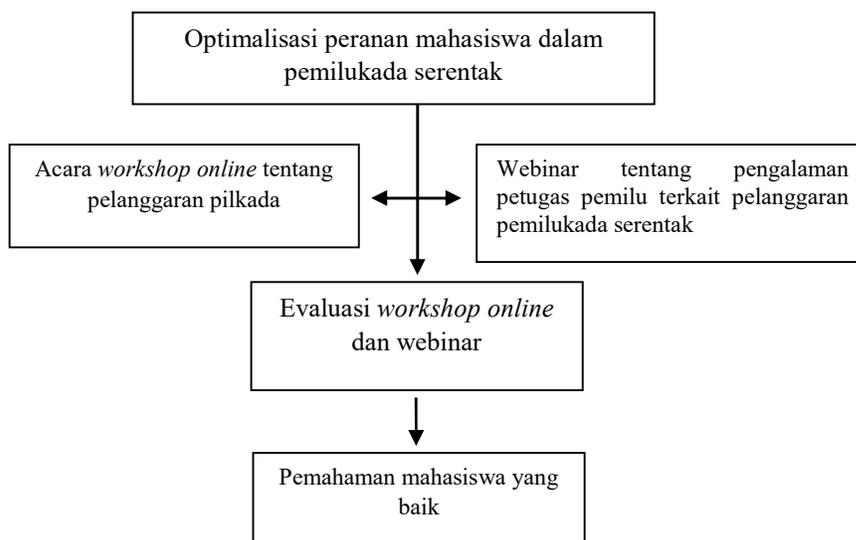
**Gambar 1** Pelaksanaan *workshop online* pilkada dan pelanggarannya  
Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

Tahap kedua memperlihatkan tukar – menukar informasi dan pengetahuan antara petugas pemilu, kepada mahasiswa, disini pemateri memberikan pengalamannya ketika menghadapi persoalan – persoalan dilapangan. Terjadi interaksi antara pemateri dan peserta, sehingga terjadi komunikasi dua arah yang efektif.



**Gambar 2.** Pelaksanaan webinar pengalaman dari petugas pemilu  
Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

Tahap yang ketiga adalah proses evaluasi terhadap kegiatan workshop online dan webinar, terkait pemahaman mahasiswa tentang materi yang telah disampaikan. Kami mendapati kawan – kawan mahasiswa setelah mengikuti kedua acara tersebut menjadi lebih luas pemahaman dan juga pengetahuanya khususnya yang ebrkaitan dnegan pelanggaran pemilukada serentak.



**Gambar 3. Proses Evaluasi kegiatan pengabdian**

Sumber: diolah dari dokumentasi hasil pengabdian

#### 4. PENUTUP

Praktik pengabdian ini, ditujukan kepada mahasiswa, dalam hal ini adalah mahasiswa dari program studi ilmu pemerintahan, FISIP, Universitas Muhamamdiyah Ponorogo, kami ingin membekali mereka dengan pemahaman yang baik, melalui pelatihan workshop online dan juga webinar, supaya nantinya ketika menjadi petugas pemilu, atau yang sekarang sudah menjadi petugas pemilu, mempunyai pemahaman dan juga wawasan yang luas terkait prkatik pelanggaran pemilukada.

Melalui kegiatan ini diharapkan semakin berkualitasnya petugas ataupun masyarakat dalam praktik demokrasi, akan mempengaruhi jalannya praktik pemilihan umum kepala daerah, secara baik dan bersih.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

Chandra, A., Darmawan, E. & Yesi. (2018). Upaya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih pada

- Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Studi Sosial dan Politik*, 2(2), 12 - 30.
- Bawaslu RI. (2015). *Indeks Kerawanan Pilkada 2015*. Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Lisma & AWL, L. T., (2017). Implikasi Partisipasi Masyarakat pada Pilkada serentak dalam meningkatkan demokrasi konstitusional di Indonesia (studi terhadap pelaksanaan pilkada serentak di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015). *Jurnal Law Reform*, 13(1), 86 - 97.
- Novita, D. & Fitri, A., (2020). Peningkatan Partisipasi Pemilih Milenial : strategi komunikasi dan sosialisasi komisi pemilihan umum pada pemilu 2019. *MAKNA: Jurnal Kajian Komunikasi, Bahasa dan Budaya*, 7(2), 56 - 84.
- Nugroho, K., (2017). Integritas Penyelenggara Pemilu : Refleksi Pilkada serentak 2015 di JATIM. *Jurnal Bawaslu*, 3(3), 437 - 452.
- Nurkinan. (2018). Peran Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilihan umum serentak anggota legislatif dan pilpres tahun 2019. *Jurnal Politikom Indisioana*, 3(1), 26 - 40.
- Syarifudin, A. (2020). Bimbingan teknis tentang peran pengawasan dalam penyelesaian sengketa pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020. *DEDIKASI: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 141 - 152.
- Warganegara, A. (2019). Evaluasi Pilkada Serentak 2015 dan Pemilu 2019 : Sebuah catatan singkat. *Wacana Publik* , 13(1), 1-6.